

Regenerative Tourism: Dari Sustainable Menuju Positive Impact dalam Pariwisata Global

Muhammad Rahmad¹, Raden Kalin Aqila Fatiha²

^{1,2}Institut Pariwisata Trisakti

¹ muhammadrahmad@iptrisakti.ac.id ; ² raden.fatiha@student.stptrisakti.ac.id

Abstrak

Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) telah lama dipandang sebagai solusi untuk menekan dampak negatif pariwisata melalui keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, konsep ini sering kali terjebak pada prinsip *do no harm* sehingga kurang mampu menghadirkan perubahan yang transformatif (Suharto et al., 2024; Harsono et al., 2025). *Regenerative tourism* hadir sebagai paradigma baru yang menekankan penciptaan *positive impact* melalui pemulihan ekosistem, penguatan identitas budaya lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Darmayasa et al., 2025; Bellato & Frantzeskaki, 2023). Paradigma ini menuntut penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan potensi lokal, dan perubahan pola pikir kolektif agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan (Puja et al., 2024; Dredge, 2022). Penerapannya mendorong kolaborasi multipihak antara pemerintah, industri, komunitas lokal, dan wisatawan agar pariwisata mampu berfungsi sebagai kekuatan transformatif (Radyahadi & Nurfara, 2024). Meskipun menghadapi tantangan metodologis, regulatif, dan resistensi industri, *regenerative tourism* membuka peluang bagi terwujudnya destinasi yang lebih resilien, inklusif, dan berkeadilan (Rastegar, 2025; Islam et al., 2024). Pergeseran paradigma dari *sustainable* menuju *regenerative tourism* menandai transisi fundamental dari prinsip *do no harm* menuju *do more good*, menjadikan pariwisata sebagai instrumen transformatif yang meninggalkan warisan positif lintas generasi.

Kata Kunci: *regenerative tourism; pariwisata berkelanjutan; positive impact; pemulihan ekosistem; pariwisata berbasis komunitas*

1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Kontribusinya tampak dalam berbagai bentuk, mulai dari peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, hingga promosi identitas budaya lokal ke kancah global. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pariwisata bahkan menjadi salah satu penopang utama perekonomian melalui devisa dari wisatawan mancanegara dan perputaran ekonomi lokal yang melibatkan jutaan tenaga kerja. Akan tetapi, pertumbuhan pariwisata yang pesat tidak jarang menimbulkan paradoks: satu sisi ia menawarkan kemakmuran, di sisi lain menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, degradasi budaya, urbanisasi berlebihan, hingga ketidakmerataan distribusi manfaat ekonomi (Suharto et al., 2024).

Situasi inilah yang melahirkan kebutuhan akan konsep pembangunan pariwisata yang lebih terarah, sehingga lahir paradigma *sustainable tourism* yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai fondasi pembangunan pariwisata. Meskipun demikian, paradigma pariwisata berkelanjutan sering kali dikritik karena terjebak dalam prinsip *do no harm*—yang pada praktiknya hanya menekankan upaya meminimalkan kerusakan tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan. Konsep ini cenderung bersifat defensif sehingga lebih berfokus pada pencegahan dampak negatif daripada mendorong perbaikan kondisi yang sudah rusak (Harsono et al., 2025). Banyak destinasi wisata yang mengklaim diri berlandaskan prinsip keberlanjutan ternyata masih menghadapi permasalahan serius, termasuk degradasi ekosistem pesisir, eksploitasi budaya tradisional yang direduksi menjadi komoditas, serta ketimpangan ekonomi di mana masyarakat lokal hanya berperan sebagai pekerja dengan penghasilan minim.

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, muncul paradigma baru yaitu *regenerative tourism*. Berbeda dengan keberlanjutan yang menekankan pemeliharaan agar kondisi tidak memburuk, regenerasi mengusung prinsip penciptaan *positive impact*. Konsep ini menuntut agar pariwisata tidak hanya menjaga, tetapi juga memulihkan ekosistem yang rusak, menghidupkan kembali budaya lokal yang terpinggirkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi (Darmayasa et al., 2025). Perbedaan mendasar antara pariwisata berkelanjutan dan regeneratif terletak pada orientasinya: jika keberlanjutan cenderung memosisikan tujuan pembangunan pada titik "menahan kerusakan", maka regenerasi mendorong terciptanya transformasi yang lebih dalam (Tham & Sharma, 2023; Islam et al., 2024).

Konteks global semakin mempertegas urgensi transisi menuju pariwisata regeneratif. Tantangan besar seperti krisis iklim, degradasi keanekaragaman hayati, ketidakadilan ekonomi global, hingga disrupsi sosial akibat pariwisata massal menuntut adanya pendekatan yang lebih radikal dibanding sekadar prinsip keberlanjutan. Beberapa studi bahkan mengungkap bahwa praktik *greenwashing* masih marak ditemukan di destinasi yang mengklaim diri berkelanjutan, sehingga implementasinya sering kali jauh dari transformasi yang diharapkan (Bellato & Pollock, 2025). Dalam kondisi seperti ini, regenerasi hadir sebagai paradigma yang lebih kuat karena menuntut perubahan sistemik—bukan hanya mitigasi kerusakan, melainkan penciptaan nilai baru yang secara nyata memulihkan hubungan antara manusia, alam, dan budaya.

Indonesia dengan kekayaan alam dan keragaman budaya yang dimilikinya memiliki peluang besar untuk mengadopsi paradigma regeneratif. Potensi bentang alam tropis, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya yang kaya dapat menjadi basis utama pembangunan pariwisata regeneratif. Namun, tekanan akibat urbanisasi, alih fungsi lahan untuk infrastruktur wisata, eksploitasi kawasan konservasi, hingga lemahnya tata kelola destinasi masih menjadi hambatan signifikan. Praktik pariwisata massal yang masih dominan di sejumlah destinasi populer seperti Bali dan Labuan Bajo menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dengan kebutuhan jangka panjang untuk keberlanjutan (Dredge, 2022; Rastegar, 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis konsep *regenerative tourism*, mengidentifikasi implementasi dan tantangannya, serta merumuskan relevansinya dalam konteks pengembangan pariwisata Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Keterbatasan Paradigma Sustainable Tourism

Pariwisata berkelanjutan telah memberikan kontribusi penting dalam meringkai pembangunan destinasi yang lebih bertanggung jawab. Suharto et al. (2024) mendokumentasikan perkembangan prinsip keberlanjutan dalam pariwisata dari perspektif teoretis hingga praktis, menunjukkan bahwa konsep ini telah berhasil mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka pembangunan yang koheren. Irawati dan Prasetyo (2025) melengkapi perspektif ini dengan mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi keberlanjutan di Indonesia, termasuk inkonsistensi kebijakan, lemahnya penegakan regulasi, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan.

Namun, Harsono et al. (2025) dalam kajian komprehensif tentang pariwisata berkelanjutan di Indonesia mengidentifikasi bahwa prinsip *do no harm* yang menjadi inti keberlanjutan memiliki keterbatasan mendasar: ia tidak secara aktif mendorong perbaikan kondisi yang sudah terdegradasi. Ateljevic dan Sheldon (2022) memperkuat argumen ini dengan menyebut transformasi menuju masa depan pariwisata yang regeneratif sebagai keniscayaan, mengingat paradigma berkelanjutan yang bersifat defensif tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas krisis global. Dziadkiewicz et al. (2024) dalam kajian mereka tentang kesenjangan antara teori dan praktik *regenerative tourism* menemukan bahwa banyak destinasi yang secara formal mengadopsi prinsip keberlanjutan tetapi dalam praktiknya masih melakukan eksploitasi sumber daya alam dan budaya demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

2.2 Konsep dan Kerangka Regenerative Tourism

Regenerative tourism pertama kali dikonseptualisasikan secara sistematis oleh Bellato, Frantzeskaki, dan Nygaard (2023) yang mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori sistem ekologis, filosofi regenerasi, dan pendekatan pariwisata berbasis tempat (*place-based tourism*). Kerangka ini menempatkan regenerasi sebagai proses yang bekerja secara simultan pada tiga level: level ekosistem (pemulihan dan penguatan sistem alam), level komunitas (pemberdayaan dan transformasi sosial), dan level pengunjung (perubahan perspektif dan perilaku).

Dredge (2022) menawarkan perspektif yang lebih operasional dengan mengidentifikasi tiga dimensi transformasi yang diperlukan untuk transisi menuju *regenerative tourism*: transformasi pola pikir (*mindsets*)—dari orientasi ekstraktif menuju orientasi pemulihan; transformasi sistem (*systems*)—dari struktur top-down menuju tata kelola kolaboratif multipihak; dan transformasi praktik (*practices*)—dari standar minimum keberlanjutan menuju standar aktif pemulihan. Bellato dan Pollock (2025) dalam tinjauan mutakhir tentang *state-of-the-art regenerative tourism* mengonfirmasi bahwa ketiga dimensi transformasi ini harus terjadi secara bersamaan—bukan sekuensial—untuk menghasilkan dampak regeneratif yang nyata.

2.3 Regenerative Justice dan Dimensi Keadilan

Rastegar (2025) memperkenalkan konsep *regenerative justice* sebagai dimensi kritis yang seringkali diabaikan dalam diskursus regeneratif. Konsep ini menempatkan pemerataan manfaat pariwisata bagi seluruh lapisan masyarakat—termasuk kelompok rentan, masyarakat adat, perempuan, dan pelaku usaha mikro—sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan dari agenda regenerasi. Tanpa keadilan distributif, regenerasi hanya akan menguntungkan kelompok yang sudah memiliki akses dan sumber daya, sementara kelompok yang paling terdampak oleh eksploitasi pariwisata justru terus terpinggirkan.

McEnhill, Jorgensen, dan Urlich (2020) memperkuat dimensi ini dengan mengeksplorasi konsep "membayar ke depan dan ke belakang" (*paying it forward and back*) dalam pariwisata regeneratif, yaitu komitmen untuk tidak hanya memperbaiki kondisi saat ini tetapi juga mengembalikan utang ekologis dan sosial yang ditinggalkan oleh perkembangan pariwisata di masa lalu. Pendekatan ini sangat relevan untuk konteks Indonesia, di mana banyak destinasi populer mengalami eksploitasi yang panjang tanpa kompensasi yang memadai bagi komunitas lokal dan ekosistem yang terdampak.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*). Sumber data mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional dan nasional, buku akademik, laporan penelitian, dan prosiding konferensi yang relevan dengan tema *regenerative tourism*, transisi dari *sustainable tourism*, implementasi pariwisata regeneratif, dan konteks Indonesia. Kriteria inklusi literatur meliputi: relevansi tematik dengan *regenerative tourism* dan pariwisata berkelanjutan, diterbitkan dalam rentang 2020–2025 untuk memastikan kemutakhiran diskursus, dan tersedia dalam bentuk yang dapat diverifikasi.

Analisis dilakukan secara tematik dengan mengkategorikan temuan ke dalam empat dimensi utama: konsep dan kerangka teoretis *regenerative tourism*, implementasi multidimensi (lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi), tantangan dan hambatan, serta peluang dan relevansi untuk konteks Indonesia. Sintesis lintas tema kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan implikasi kebijakan yang dapat diformulasikan dari keseluruhan kajian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Perbandingan Sustainable dan Regenerative Tourism

Pariwisata berkelanjutan dan regeneratif bukan merupakan konsep yang saling bertentangan, melainkan berada dalam sebuah kontinum evolusi paradigma yang menggambarkan perkembangan pemikiran tentang peran pariwisata dalam pembangunan (Ateljevic & Sheldon, 2022). Keberlanjutan memberikan fondasi penting dengan menetapkan standar minimum bahwa pariwisata tidak boleh merusak sumber daya alam dan budaya yang menjadi basis penghidupan. Namun, fondasi ini ternyata tidak cukup untuk mendorong perbaikan aktif terhadap kondisi yang sudah terdegradasi (Suharto et al., 2024).

Dredge (2022) mengidentifikasi perbedaan mendasar antara kedua paradigma melalui tiga dimensi. Pertama, orientasi tujuan: keberlanjutan berorientasi pada pemeliharaan status quo (*sustaining*), sementara regenerasi berorientasi pada transformasi aktif (*regenerating*). Kedua, arah intervensi: keberlanjutan bersifat defensif (mencegah kerusakan lebih lanjut), sedangkan regenerasi bersifat proaktif (memulihkan yang sudah rusak dan menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya). Ketiga, kriteria keberhasilan: keberlanjutan diukur dari berkurangnya dampak negatif, sedangkan regenerasi diukur dari meningkatnya dampak positif yang terukur dan dirasakan oleh ekosistem, komunitas, dan budaya.

Hussain dan Haley (2022) menambahkan perspektif penting bahwa tantangan utama dalam mengadaptasi konsep regenerasi dari ilmu alam ke industri pariwisata terletak pada kompleksitas sistem sosial-ekologis yang tidak dapat disederhanakan menjadi formula tunggal. Regenerasi dalam konteks pariwisata harus dipahami sebagai proses yang *place-specific*—bergantung pada karakteristik unik setiap destinasi, komunitas, dan ekosistem—bukan sebagai standar universal yang dapat diterapkan secara seragam. Dziadkiewicz et al. (2024) mengonfirmasi hal ini dengan menemukan kesenjangan yang signifikan antara retorika regenerasi yang digunakan dalam komunikasi pemasaran destinasi dengan praktik nyata yang terjadi di lapangan.

4.2 Implementasi Multidimensi Regenerative Tourism

Implementasi *regenerative tourism* mencakup empat dimensi yang saling berkaitan dan harus dikembangkan secara terintegrasi untuk menghasilkan dampak yang benar-benar transformatif.

Dimensi Lingkungan: Pemulihan Ekosistem. Dari segi lingkungan, regenerasi diwujudkan melalui program pemulihan ekosistem aktif yang melampaui sekadar pengurangan dampak. Sandy et al. (2024) mendokumentasikan penerapan *regenerative design* dalam arsitektur kawasan pantai Samas yang mengintegrasikan prinsip ekologis dalam setiap aspek pembangunan: penggunaan material lokal ramah lingkungan, sistem pengolahan limbah mandiri, dan desain yang menyatu dengan lanskap alam sehingga tidak hanya mengurangi kerusakan tetapi juga memperbaiki kondisi ekologi yang sudah terdampak pembangunan sebelumnya. Pendekatan ini sejalan dengan visi Darmayasa et al. (2025) yang menempatkan pemulihan ekosistem—termasuk rehabilitasi mangrove, restorasi terumbu karang, dan revitalisasi kawasan pesisir—sebagai komponen inti *regenerative tourism*.

Dimensi Sosial: Pemberdayaan Komunitas. Dari sisi sosial, regenerasi menghadirkan paradigma baru dalam hubungan antara masyarakat lokal dan industri pariwisata. Puja et al. (2024) mendokumentasikan program pendampingan desa wisata di Indonesia yang memperlihatkan bahwa dengan pelatihan dan dukungan manajemen yang tepat, masyarakat mampu bertransisi dari posisi sebagai pekerja rendahan menjadi pengelola, pengusaha, dan inovator yang menciptakan produk pariwisata berbasis kearifan lokal. Shukla dan Shamurailatpam (2023) memperkuat temuan ini dengan menganalisis bagaimana orientasi regeneratif—yang menekankan pemberdayaan komunitas dan diversifikasi ekonomi lokal—terbukti meningkatkan ketahanan destinasi dalam menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19.

Dimensi Budaya: Revitalisasi Warisan. Dari dimensi budaya, regenerasi menekankan bahwa warisan budaya bukan sekadar atraksi wisata, tetapi sumber nilai dan identitas yang harus

diperlakukan dengan penghargaan mendalam. Duxbury et al. (2020) menunjukkan bahwa pendekatan *creative tourism* yang mengedepankan partisipasi aktif wisatawan dalam praktik budaya autentik—bukan sekadar menonton pertunjukan—dapat mendorong munculnya bentuk regenerasi budaya yang sekaligus melestarikan tradisi dan mengembangkannya agar sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini tanpa kehilangan akar kearifan lokal. Radyahadi dan Nurfara (2024) dalam konteks Indonesia mengidentifikasi bahwa program revitalisasi festival tradisional, seni pertunjukan, dan kuliner khas yang melibatkan generasi muda sebagai pelaku utama merupakan strategi regenerasi budaya yang paling efektif dalam jangka panjang.

Dimensi Ekonomi: Distribusi yang Berkeadilan. Dari segi ekonomi, regenerasi menekankan distribusi manfaat yang lebih adil dan merata. Keskin dan Aktaş (2024) mengidentifikasi bahwa pemasaran gastronomi berkelanjutan dan pariwisata regeneratif yang mengedepankan produk lokal autentik dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan UMKM lokal sekaligus menciptakan daya tarik diferensiasi bagi destinasi. Rastegar (2025) mempertegas dimensi ini dengan konsep *regenerative justice* yang menuntut agar kelompok yang selama ini paling terdampak negatif oleh pariwisata—termasuk masyarakat adat, perempuan, dan pelaku usaha kecil—mendapatkan prioritas dalam distribusi manfaat regeneratif.

4.3 Tantangan dalam Implementasi Regenerative Tourism

Meskipun prospeknya besar, penerapan *regenerative tourism* menghadapi tantangan yang signifikan dari berbagai sisi.

Keterbatasan Metodologi Evaluasi. Islam et al. (2024) mengidentifikasi bahwa keterbatasan dalam metrik dan metodologi evaluasi menjadi hambatan kritis dalam mengukur keberhasilan regenerasi secara akurat. Sebagian besar indikator yang tersedia masih berorientasi pada keberlanjutan, sehingga tidak mampu menangkap dimensi-dimensi unik regenerasi seperti vitalitas ekosistem yang dipulihkan, penguatan kapasitas adaptif komunitas, atau kedalaman transformasi budaya yang terjadi. Tanpa instrumen pengukuran yang tepat, klaim regeneratif sulit dibedakan dari *greenwashing* yang sekadar menggunakan retorika regenerasi tanpa perubahan substantif.

Resistensi Industri. Hussain dan Haley (2022) mendokumentasikan bahwa resistensi dari pelaku industri yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek merupakan hambatan yang paling sulit diatasi. Banyak pelaku usaha menilai bahwa penerapan prinsip regeneratif memerlukan investasi besar, perubahan pola pikir mendasar, dan restrukturisasi model bisnis yang kompleks—sementara manfaatnya seringkali tidak langsung terasa dalam siklus bisnis jangka pendek. Bellato dan Pollock (2025) menambahkan bahwa praktik *greenwashing* yang masih marak terjadi justru mempersulit konsumen untuk membedakan destinasi yang benar-benar menerapkan prinsip regeneratif dengan yang hanya memanfaatkan retorika regenerasi untuk kepentingan pemasaran.

Keterbatasan Regulasi dan Kebijakan. Irawati dan Prasetyo (2025) mengidentifikasi bahwa kebijakan pariwisata di Indonesia—dan di banyak negara lain—masih lebih dominan mengadopsi kerangka keberlanjutan daripada menyediakan dukungan spesifik bagi model regeneratif. Ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mendorong dan memberikan insentif bagi praktik regeneratif membuat implementasinya bergantung pada inisiatif sukarela pelaku industri yang tentu saja sangat terbatas jangkauannya.

4.4 Peluang Regenerative Tourism di Indonesia

Indonesia memiliki modal dasar yang sangat kuat untuk menjadi laboratorium *regenerative tourism* di tingkat Asia Tenggara. Darmayasa et al. (2025) mengidentifikasi bahwa kekayaan ekosistem tropis, keanekaragaman hayati yang luar biasa, dan kekayaan warisan budaya yang beragam merupakan kombinasi modal yang langka dan sangat bernilai bagi pengembangan pariwisata regeneratif yang autentik.

Puja et al. (2024) membuktikan melalui program pendampingan di berbagai desa wisata bahwa masyarakat Indonesia memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi ketika diberikan dukungan yang tepat. Program pengembangan kapasitas SDM pariwisata yang mengintegrasikan pemanfaatan produk lokal dan prinsip tata kelola regeneratif terbukti mampu meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan sekaligus memperkuat perekonomian komunitas. Radyahadi dan Nurfara (2024) dalam analisis implementasi *regenerative tourism* di Indonesia mengidentifikasi sejumlah praktik terbaik yang telah berkembang secara organik, termasuk model ekowisata berbasis masyarakat di sejumlah taman nasional, program revitalisasi desa tradisional, dan inisiatif ekonomi kreatif yang mengangkat kerajinan dan kuliner lokal.

Namun, Dredge (2022) mengingatkan bahwa peluang besar ini hanya dapat direalisasikan jika Indonesia berhasil mengatasi tegangan antara kepentingan pariwisata massal jangka pendek—yang masih mendominasi di destinasi seperti Bali dan Labuan Bajo—dengan kebutuhan transformasi sistemik jangka panjang menuju pariwisata regeneratif. Dibutuhkan kepemimpinan kebijakan yang berani untuk menggeser insentif industri dari orientasi kuantitas kunjungan menuju kualitas dampak positif yang terukur.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Simpulan

Pergeseran paradigma dari *sustainable tourism* menuju *regenerative tourism* merepresentasikan evolusi konseptual yang sangat penting dalam pembangunan pariwisata global. Keberlanjutan memberikan fondasi yang diperlukan dengan menetapkan prinsip *do no harm*, tetapi keterbatasannya sebagai paradigma yang bersifat defensif dan berorientasi pemeliharaan membuat ia tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas tantangan global kontemporer (Suharto et al., 2024; Harsono et al., 2025). *Regenerative tourism* hadir sebagai jawaban yang lebih progresif dengan mendorong transisi fundamental dari *sustaining* menuju *regenerating*, dari *do no harm* menuju *do more good* (Dredge, 2022; Bellato & Frantzeskaki, 2023).

Implementasi regenerasi pada dimensi lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi menunjukkan bahwa pariwisata sesungguhnya memiliki kapasitas untuk menjadi kekuatan transformatif yang memulihkan ekosistem, memberdayakan komunitas, merevitalisasi warisan budaya, dan mendistribusikan manfaat secara lebih berkeadilan (Darmayasa et al., 2025; Puja et al., 2024; Rastegar, 2025). Tantangan yang ada—berupa keterbatasan metodologi evaluasi, resistensi industri, dan ketidakmampuan regulasi—nyata dan signifikan, tetapi tidak lebih besar dari peluang yang dibuka oleh paradigma ini untuk menciptakan masa depan pariwisata yang lebih resilien, inklusif, dan bermakna (Islam et al., 2024; Hussain & Haley, 2022; Bellato & Pollock, 2025).

Untuk Indonesia, *regenerative tourism* bukan sekadar alternatif konseptual melainkan kebutuhan strategis yang mendesak. Kekayaan alam dan budaya nusantara yang melimpah hanya akan dapat dipertahankan dan dikembangkan secara optimal jika dikelola dengan paradigma yang menempatkan pemulihan dan penguatan—bukan sekadar pemeliharaan—sebagai tujuan utama pembangunan pariwisata (Radyahadi & Nurfara, 2024; Darmayasa et al., 2025).

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisis, empat rekomendasi strategis dapat dirumuskan. Pertama, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan kerangka kebijakan dan regulasi yang secara eksplisit mengakui dan memberikan insentif bagi praktik *regenerative tourism*, termasuk sistem sertifikasi regeneratif, insentif fiskal bagi destinasi yang memenuhi standar pemulihan ekosistem, dan mekanisme redistribusi pendapatan pariwisata yang berkeadilan (Irawati & Prasetyo, 2025; Rastegar, 2025). Kedua, pengembangan metodologi evaluasi dampak regeneratif yang sesuai konteks Indonesia menjadi prioritas akademik dan kebijakan yang mendesak, mencakup indikator ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang terintegrasi dalam satu sistem monitoring yang berkelanjutan (Islam et al., 2024). Ketiga, program pendampingan dan pengembangan kapasitas komunitas lokal harus diperluas dan diperkuat sebagai instrumen utama transisi menuju *regenerative tourism*, dengan menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima manfaat (Puja et al., 2024; Radyahadi & Nurfara, 2024). Keempat, industri pariwisata perlu didorong untuk mengadopsi model bisnis regeneratif melalui kombinasi regulasi, insentif pasar, dan edukasi konsumen yang meningkatkan permintaan terhadap produk dan destinasi yang benar-benar menerapkan prinsip regeneratif, bukan sekadar menggunakan retorika keberlanjutan (Bellato & Pollock, 2025; Keskin & Aktaş, 2024).

Daftar Pustaka

- Ateljevic, I., & Sheldon, P. J. (2022). Guest editorial: Transformation and the regenerative future of tourism. *Journal of Tourism Futures*, 8(3), 266–268.
- Bellato, L., Frantzeskaki, N., & Nygaard, C. A. (2023). Regenerative tourism: A conceptual framework leveraging theory and practice. *Tourism Geographies*, 25(4), 1026–1046.
- Bellato, L., & Pollock, A. (2025). Regenerative tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 27(3–4), 558–567.
- Darmayasa, D., Wulandari, P. P., Tirtawati, N. M., Farid, F., Putra, A. M., Bestari, N. M. P., ... & Shantika, B. (2025). *Regenerative tourism: Transformasi ekowisata masa depan*. Star Digital Publishing.
- Dredge, D. (2022). Regenerative tourism: Transforming mindsets, systems and practices. *Journal of Tourism Futures*, 8(3), 269–281.
- Duxbury, N., Bakas, F. E., Vinagre de Castro, T., & Silva, S. (2020). Creative tourism development models towards sustainable and regenerative tourism. *Sustainability*, 13(1), 2.

Dziadkiewicz, A., Sokołowska, E., & Borawska-Dziadkiewicz, J. (2024). Regenerative tourism—Between theory and practice. *Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie*, 199–214.

Harsono, I., Demung, I. W., Judijanto, L., Sari, H. P. R., & Ananti, D. D. (2025). *Pariwisata berkelanjutan: Teori dan penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Hussain, A., & Haley, M. (2022). Regenerative tourism model: Challenges of adapting concepts from natural science to tourism industry. *Journal of Sustainability and Resilience*, 2(1), 4.

Irawati, N., & Prasetyo, H. (2025). *Pariwisata berkelanjutan: Konsep, penerapan, dan tantangan*. Penerbit Widina.

Islam, M. S., Azizzadeh, F., & Islam, M. S. (2024). How can we evaluate regeneration in tourism?: Advancing metrics and methodologies for a sustainable transformation. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 8(1), 1–9.

Keskin, E., & Aktaş, F. (2024). Marketing in sustainable gastronomy and regenerative tourism. Dalam *The Role of Artificial Intelligence in Regenerative Tourism and Green Destinations* (hal. 371–384). Emerald Publishing Limited.

McEnhill, L., Jorgensen, E. S., & Ulrich, S. (2020). Paying it forward and back: Regenerative tourism as part of place.

Puja, I. B. P., Pitanatri, P. D. S., Priliani, N. L. D., Kartini, L. P., & Sukariyanto, I. G. M. (2024). Pengembangan kapasitas SDM pariwisata melalui pendampingan tata kelola destinasi dan pemanfaatan produk lokal untuk mendukung pariwisata regeneratif. *Journal Community Service Consortium*, 4(2), 57–70.

Radyahadi, F., & Nurfara, N. A. (2024). Implementation of regenerative tourism in the development of tourism destinations in Indonesia. *International Journal of Sustainable Competitiveness on Tourism*, 3(01), 1–10.

Rastegar, R. (2025). Regenerative justice and tourism: How can tourism go beyond restoration? *Annals of Tourism Research*, 111, 103896.

Sandy, A., Prakoso, A. A., & Vitrianto, P. N. (2024). Regeneratif desain kawasan pantai Samas dalam arsitektural ekologis. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 7(3), 124–136.

Shukla, P. S., & Shamurailatpam, S. D. (2023). Regenerative tourism and resilience in COVID-19 pandemic: From strategic principles to sustainability. Dalam *Resilient and Sustainable Destinations After Disaster: Challenges and Strategies* (hal. 251–266). Emerald Publishing Limited.

Suharto, B., Judijanto, L., Apriyanto, H., Raksapati, A., Payangan, O. R., Tikupadang, W. K., ... & Amalia, A. (2024). *Pariwisata berkelanjutan: Prinsip, perspektif, dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Tham, A., & Sharma, B. (2023). Regenerative tourism: Opportunities and challenges. *Journal of Responsible Tourism Management*, 3(1), 15–23.